

ABSTRAK

Rayzan Fathurrozak, 1213030116, 2025, *Pelaksanaan Perlindungan Anak Terlantar Berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Perspektif Siyasah Dusturiyah.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya anak yang hidup dalam kondisi terlantar di Kota Bandung meskipun telah diberlakukan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan, khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak anak yang terlantar. Anak terlantar merupakan kelompok rentan yang seharusnya memperoleh perhatian khusus dari pemerintah, baik dalam bentuk pengasuhan, perlindungan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan sebagai bagian dari hak dasar anak yang dijamin oleh hukum.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi perlindungan anak terlantar di Kota Bandung berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019, serta menganalisis dampak pelaksanaan kebijakan tersebut terhadap pemenuhan hak-hak anak, dan meninjau pelaksanaan kebijakan tersebut dari perspektif siyasah dusturiyah.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, teori tanggung jawab negara untuk melihat kewajiban pemerintah dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak terlantar, teori maqashid syariah (khususnya hifz an-nasl) untuk menilai pemenuhan hak anak sebagai bentuk menjaga keturunan serta masa depan generasi, dan teori siyasah dusturiyah untuk mengkaji kebijakan perlindungan anak dalam kerangka pemerintahan Islam yang adil dan maslahat.

Metode penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kota Bandung dan LKSA Albarr, serta dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui empat tahapan yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi perlindungan anak terlantar di Kota Bandung dilakukan melalui mekanisme laporan masyarakat, asesmen, dan kerja sama dengan lembaga sosial, namun masih bersifat parsial dan belum menjangkau seluruh anak terlantar secara menyeluruh; (2) Dampak terhadap pemenuhan hak anak belum merata. Anak yang diasuh di LKSA memperoleh hak secara lebih optimal, sementara anak di luar lembaga masih mengalami keterbatasan; (3) Tinjauan siyasah dusturiyah menunjukkan bahwa Perda ini telah sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam, namun implementasinya masih memerlukan penguatan komitmen politik, pengawasan, dan partisipasi masyarakat agar lebih optimal dalam menjaga keturunan dan pemenuhan hak anak.

Kata Kunci: *Perlindungan Anak Terlantar, Peraturan Daerah, Siyasah Dusturiyah.*